

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemahaman terhadap *Good Governance* dan prinsipnya

Hasil dan pembahasan dalam bab ini, penulis akan mendeskripsikan pemahaman para informan terhadap pengertian *good governance* beserta prinsip-prinsipnya karena akan memudahkan penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini.

1. Pemahaman Informan terhadap pengertian *Good Governance* (Tata Pemerintahan yang baik)

Sejumlah pihak di Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran menerjemahkan *Governance* sebagai tata pemerintahan yang baik. Tata pemerintahan yang baik di sini bukan hanya dalam pengertian struktur dan manajemen lembaga yang di sebut eksekutif, karena pemerintah (*government*) hanyalah salah satu dari tiga aktor besar yang membentuk lembaga yang disebut *governance*. Dua aktor lain adalah private sektor (sektor swasta) dan *civil society* (masyarakat madani). Oleh karenanya memahami *governance* adalah memahami bagaimana integrasi peran antara pemerintah (birokrasi), sektor swasta dan *civil society* dalam suatu aturan main yang di sepakati bersama.

Kepala Desa Kurungan Nyawa menyatakan bahwa, tata pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang sesuai dengan aturan yang telah di tentukan oleh pemerintah di atasnya atau mengikuti prosedur-prosedur yang sah. Pemerintahan

yang baik juga memberikan pelayanan yang baik, cepat, tepat dan tanpa adanya perbedaan.

Berbeda dengan pendapat yang di berikan oleh Kasi Pembangunan yang menyatakan bahwa tata pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang semua jalannya roda pemerintahan harus transparan terhadap seluruh masyarakat. Apapun program yang di berikan oleh pemerintah kecamatan atau pusat, harus di sampaikan oleh pemerintah desa kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat di ketahui aparatur Pemerintah Desa Kurungan Nyawa mengartikan *good governance* sebagai tata pemerintahan yang harus mengikuti peraturan baik formal dan non formal dan menekankan pada pelaksanaan prosedur, dari pemerintahan di atasnya seperti Kecamatan dan Kabupaten. Aparat pemerintah Desa Kurungan Nyawa juga kurang menyadari bahwa pemerintahan desa merupakan lembaga yang otonom sehingga di harapkan dapat menjalankan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip desentralisasi atau secara garis besar konsep yang informan pegang pada dasarnya sama halnya dengan konsep yang di pegang oleh para akademisi. Jika informan memahami *good governance* dengan istilah “kepemerintahan yang baik”, sedangkan pada umumnya akademisi menggunakan istilah “Tata Pemerintahan Yang Baik”.

Tata Pemerintahan Yang Baik (*good governance*) merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang di lakukan oleh komponen yakni pemerintah, rakyat, dan usahawan yang berada di sektor swasta

2. Prinsip-prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)

Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keuangan Daerah yang selanjutnya diubah oleh Undang-undang nomor 32 dan 33 tahun 2004, telah mengantarkan Indonesia memasuki proses pemerintahan desentralisasi setelah lebih dari 30 tahun berada di bawah rezim orde baru yang serba sentralistis. Implementasi kedua undang-undang tersebut menjadi momentum perpindahan pengawasan, sumber daya fiskal, otonomi politik dan tanggung jawab pelayanan publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Selama rentang perpindahan yang lebih dari satu dasawarsa tersebut, berbagai pengalaman lokal yang heterogen telah muncul ke permukaan, seiring longgarnya pengawasan pusat atas daerah dan meningkatnya wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik, maka dari itu perlu di sadari bahwa proses kesadaran pembelajaran tentang prinsip-prinsip desentralisasi Desa Kurungan Nyawa menjadi tantangan yang terbilang baru baik terhadap aparatur desa maupun masyarakat di tingkat bawah.

Prinsip-prinsip *good governance* dalam di Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran menitikberatkan pada aspek masyarakat sebagai aktor terdepan di samping nilai-nilai moralitas personal dan kelembagaan, hal ini tercermin dari pendapat para informan di lapangan.

Prinsip yang terkandung dalam pelaksanaan pemerintahan desa menurut pendapat Kaur Pemerintahan adalah pemerintah yang harus membuka seluas-luasnya atau

transparan terhadap masyarakat, sehingga membangun opini untuk kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah desa, dan juga pemerintah harus bertanggung jawab dalam hal apapun.

Kaur Keuangan berpendapat bahwa beberapa prinsip yang harus terkandung yang di antaranya adalah transparansi, apalagi dalam tatanan pemerintah desa, masyarakat desa menginginkan pemerintah itu harus terbuka. Kepala desa selaku pemegang amanah untuk menjalankan keinginan masyarakat harus mampu melaksanakan tuntutan tersebut.

Berdasarkan pemaparan para informan di atas pada umumnya para informan mengetahui prinsip-prinsip yang terkandung dalam prinsip *good governance*, walaupun prinsip yang mereka sebutkan hanya di ketahui dan berkembang sebatas pengetahuan umum mereka, untuk menciptakan pelayanan pemerintahan yang baik, atau dengan kata lain pemaparan informan hanya berdasarkan prinsip yang hidup dan berkembang di kalangan masyarakat Desa Kurungan Nyawa.

3. Analisis pemahaman informan terhadap *Good Governance* dan prinsipnya

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan maka dapat di analisis bahwa ada perbedaan istilah mengenai *good governance* tetapi tidak memiliki perbedaan secara substansi. Jika para informan memahami *good governance* dalam pemahaman “Kepemerintahan Yang Baik”, sedangkan yang di maksud penulis adalah istilah *good governance* dalam pemahaman “Tata Pemerintahan Yang Baik”. Sedangkan secara umum prinsip-prinsip *good governance* yang mereka

sebutkan dalam hasil wawancara merupakan prinsip utama dari pemahaman *good governance* dalam arti tata pemerintahan yang baik. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa aparat Desa Kurungan Nyawa memahami *good governance* dalam koridor pemahaman yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Penulis melihat bahwa pemahaman *good governance* bagi aparat Desa lebih banyak di artikan sebagai tindakan aplikatif ketimbang pengistilahan yang menjadi perdebatan akademis, oleh karena itu berkaitan dengan hal ini *good governance* terkait dengan perencanaan suatu program untuk bisa mencapai target seoptimal mungkin mulai dari kemampuan mengkonsep sampai dengan kemampuan dalam teknis operasional, sehingga aparat desa menerjemahkan keberhasilan *good governance* adalah apabila aparatur sudah mampu mengkonsep suatu program dengan matang kemudian sampai penerapannya secara teknis dapat di terjemahkan dalam program aksi sehingga dapat terealisasi. Dari pendapat informan di atas, pemahaman sederhana ini lebih pada bagaimana menerjemahkan konsep ke dalam kegiatan aksi yang sesungguhnya.

B. Penerapan Prinsip Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran

Desa merupakan ujung tombak dari implementasi kehidupan otonomi daerah dengan mekanisme pelaksanaan sistem pemerintahan yang baik. *Good governance* atau tata pemerintahan yang baik merupakan sebuah *tools* untuk mencapai negara yang adil dan makmur, *good governance* sebagaimana yang telah di uraikan dalam Bab II adalah sebuah tata pemerintahan yang menjunjung

tinggi keinginan dan kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan kemandirian pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial serta mensinergikan hubungan antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dalam pencapaian tujuan tersebut, dengan demikian sistem pemerintahan yang baik adalah partisipasi yang melibatkan semua institusi dan memiliki hak suara dalam mempengaruhi sebuah keputusan.

Partisipasi masyarakat dalam sebuah pengambilan keputusan memberikan kontribusi keputusan yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakatnya dengan demikian para stekholder, warga masyarakat serta sektor swasta bisa melihat, bercermin dan sekaligus mendapatkan dasar pijak bagi integrasi sistem/nilai demokrasi dalam kehidupan keseharian. Hal ini merupakan sebuah fondasi legitimasi dalam sistem demokrasi. Salah satu cara untuk mengetahui kualitas partisipasi politik masyarakat dapat dilihat dari bentuk-bentuk keterlibatan seseorang dalam berbagai tahap proses pembangunan yang terencana mulai dari perumusan tujuan sampai dengan penilaian, dengan demikian bentuk partisipasi di Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaku utama pembangunan, Pembangunan desa tidak menempatkan rakyat desa sebagai obyek, melainkan menempatkan rakyat desa pada posisi yang tepat sebagai subyek dalam proses pembangunan desa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan wawancara secara langsung pada tanggal 3 Desember 2009 dengan Bapak Abdurohim. T selaku Kepala Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan mengatakan bahwa :

“ Partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam setiap proses pembangunan desa merupakan hal terpenting dalam menentukan dukungan dan keberhasilan pembangunan di Desa Kurungan Nyawa, partisipasi/ keterlibatan masyarakat antara lain adalah pada musyawarah desa dalam merumuskan perencanaan program kegiatan desa hingga pelaksanaan pembangunan dan pengawasan pembangunan desa itu sendiri selain itu sebagai wujud demokrasi masyarakat juga terlibat dalam Pemilihan Kepala Desa secara langsung”.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa partisipasi politik masyarakat sebagai alat guna memperoleh suatu informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat yang tanpa kehadirannya program pembangunan desa serta proyek akan gagal, masyarakat sangat menentukan berjalannya dan keberhasilan pembangunan desa serta pembangunan masyarakat desa itu sendiri, selain itu partisipasi mendorong masyarakat untuk lebih mempercayai program pembangunan di desa, jika merasa di libatkan dalam proses persiapan, perencanaannya dan pengambilan keputusan terhadap prioritas pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat.

Bentuk partisipasi atau peran masyarakat dalam pembangunan desa antara lain terlibat dalam musyawarah-musyawarah pengambilan kebijakan desa, pelaksanaan pembangunan desa yang melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan hingga pengawasan jalannya pembangunan desa tersebut serta terlibat dalam kegiatan politik desa yaitu pada Pemilihan Kepala Desa. Berbagai kegiatan partisipasi masyarakat Desa Kurungan Nyawa dalam kegiatan pemerintahan desa dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 9. Kegiatan Partisipasi Masyarakat Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran

KEGIATAN DESA	PARTISIPASI MASYARAKAT/ SWASTA		
	Perencanaan	Pelaksanaan	Pengawasan
Musyawarah Pengambilan Kebijakan Desa dalam pembuatan Peraturan desa	ada	ada	ada
Musyawarah Penentuan Kegiatan Pembangunan Desa (PNPMP, PKK, dll)	ada	ada	ada
Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	ada	ada	ada

Sumber : Observasi di lapangan dan wawancara terhadap informan

Berdasarkan penjelasan dan tabel di atas maka dapat di ketahui bahwa pemerintah Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran menempatkan masyarakat desa sebagai pijakan atau titik tolak setiap program pembangunannya dengan artian bahwa masyarakat Desa Kurungan Nyawa merupakan subjek terpenting dalam proses pembangunan Desa Kurungan Nyawa dan pemberdayaan masyarakatnya, hal ini ditandai dengan indikator partisipasi Desa sebagai berikut :

1. Adanya forum bagi masyarakat untuk menampung partisipasi Masyarakat

Pada indikator ini, masyarakat sebaiknya membuat suatu forum untuk menampung berbagai aspirasi mereka selain adanya BPD. Hal ini sangat penting di lakukan agar masyarakat dapat bertukar pikiran untuk lebih memikirkan bagaimana membuat penyelenggaraan pemerintahan di desa menjadi lebih baik lagi. Pemerintah Desa Kurungan Nyawa melakukan cara untuk menampung

aspirasi dari masyarakat melalui Rapat Koordinasi yang dilakukan sebulan sekali walaupun tingkat partisipasi dan inisiatif masyarakat terbilang kurang

Forum partisipasi masyarakat juga merupakan wahana dalam menampung aspirasi masyarakat, hal ini di tandai dengan berdirinya lembaga-lembaga yang menopang jalannya roda pemerintahan Desa Kurungan Nyawa antara lain : PKK, Kader Pembangunan Desa, Lembaga Kegotong-royongan Adat, Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu, Kelompok Remaja Islam Masjid, dengan menilik kondisi faktual kelembagaan pemerintahan desa saat ini yang berada dalam situasi yang memprihatinkan secara organisasional maupun manajerial. Sebagai unit birokrasi-pemerintahan, pemerintah Desa Kurungan Nyawa menghadapi persoalan keterbatasan daya-kreasi untuk menginisiasi gagasan-pembaruan.

Hasil penelitian di Desa Kurungan Nyawa menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan desa adalah semi-mobilisasi di satu sisi masyarakat di dorong untuk berperan dalam kelembagaan namun di sisi lain pemerintah Desa Kurungan Nyawa mengalami kesulitan untuk melakukan mobilisasi karena kurangnya keaktifan dari masyarakat itu sendiri, walau demikian temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kurungan Nyawa masih bersikap tanggap terhadap kepentingan masyarakat desanya. Efektifitas kerja pemerintahan Desa Kurungan Nyawa ini terlihat karena optimalisasi kinerja seluruh kelembagaan dalam struktur pemerintahan tersebut, bahkan hingga ke tingkat RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga).

2. Kemampuan Masyarakat Untuk Terlibat Dalam Proses Pembuatan Keputusan

Pada indikator ini, masyarakat di haruskan untuk mempunyai kemampuan terlibat dalam proses pembuatan suatu keputusan. Hal ini di perlukan agar masyarakat dalam mengikuti proses pembuatan keputusan bersama aparat desa dapat bersama-sama menghasilkan suatu keputusan yang bermanfaat bagi masyarakat desa itu sendiri.

Desa Kurungan Nyawa walaupun memiliki kelembagaan yang terstruktur dengan baik namun masih ada beberapa persoalan yang muncul dalam pelaksanaan partisipasi khususnya di tingkat desa, adanya kesenjangan antara kenyataan (*das sollen*) dan masih adanya persoalan hubungan dalam sistem dualitas desa dan harapan (*das sein*) bagi terwujudnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan. Partisipasi Desa Kurungan Nyawa lebih berupa cetusan-cetusan pemikiran aparat khususnya Kades yang di terapkan sebagai arah gerak-laju Desa Kurungan Nyawa, karena itu mungkin kita tak perlu terlalu heran dan sangat terlihat jika nuansa kebijakan di Desa Kurungan Nyawa cenderung *top down* (atas dorongan lembaga desa) ketimbang *bottom up* (dari masyarakat itu sendiri) yang selalu di idealkan itu, hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa konsolidasi internal di kalangan pemerintah Desa Kurungan Nyawa terlihat kuat, maka jalannya pemerintahan Desa Kurungan Nyawa adalah akibat dari penguatan konsolidasi kelembagaan dibanding penguatan partisipasi ditingkat masyarakat.

3. Fokus pemerintah dalam pemberian arah dan undangan kepada masyarakat untuk berpartisipasi

Pada indikator ini, pemerintah dalam hal ini aparat Desa Kurungan Nyawa di haruskan mempunyai fokus untuk memberikan suatu arahan dan undangan kepada masyarakat Desa Kurungan Nyawa, hal ini penting di lakukan oleh aparat desa agar tugas yang di jalankan oleh aparat desa tidak semakin berat karena adanya bantuan dari masyarakat desa itu sendiri dan masyarakat akan merasa terlayani oleh aparat Desa Kurungan Nyawa.

Sehubungan dengan pemberian arah dan undangan kepada masyarakat untuk berpartisipasi sudah di lakukan oleh aparat Desa Kurungan Nyawa, dalam setiap pemberian pengarahan aparat Desa Kurungan Nyawa selalu berusaha agar masyarakatnya dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa walaupun dalam kenyataannya masyarakat tetap bersikap pasif dan terkesan tidak mau tahu dengan penyelenggaraan pemerintahan di desanya. Hal ini di karenakan tidak adanya kesadaran dari dalam diri masyarakat Desa Kurungan Nyawa itu sendiri, meskipun Aparat Desa Kurungan Nyawa selalu memberikan undangan kepada perwakilan masyarakat setiap akan melakukan suatu kegiatan atau rapat untuk membahas masalah yang berkenaan dengan pemerintah desa itu sendiri.

4. Visi dan Pengembangan Berdasarkan Pada Konsesus Antara Pemerintah Desa dan Masyarakat

Dalam menjalankan kebijakan desa sangat penting untuk menguatkan konsolidasi internal di kalangan pemerintah desa. Semakin kuat konsolidasi tersebut, semakin efektif pula kinerja aparat, demikian pula sebaliknya. Faktor konsolidasi sangat

penting, mengingat dimensi-dimensi politis dalam pemerintahan Desa Kurungan Nyawa tak kalah menentukannya di bandingkan dengan dimensi-dimensi politis dalam pemerintahan nasional.

Hal ini berkaitan dengan basis sosial setiap aparat Desa Kurungan Nyawa, yang juga berkaitan dengan sisa-sisa persoalan semasa pemilihan Kades, artinya keberadaan Kades lahir dari sebuah konsesus masyarakat dalam menentukan sosok kepemimpinan yang berjalan sesuai keterwakilan kepentingan masyarakat banyak atau kepentingan masyarakat Desa Kurungan Nyawa itu sendiri. Untuk mengoptimalkan kebijakan desa, aparat Desa Kurungan Nyawa dalam hal ini Kepala Desa lebih menguatkan elemen-elemen yang ada di masyarakat dengan pola rekrutmen yang lebih tepat, tentunya dapat di maklumi faktor politis menjadi pertimbangan dalam rekrutmen aparat Desa Kurungan Nyawa dibanding pada pola rekrutmen sumber daya manusia, maka menjadi kontra produktif bagi Kades dan pemerintah desa pada umumnya. Pemahaman tadi menjelaskan konsesus antara pemerintah desa dan masyarakat memang telah terbangun lewat partisipasi saat pemilihan Kades sampai akhirnya terpola dalam kebijakan desa yang di lakukan aparatur Desa Kurungan Nyawa.

5. Akses Bagi Masyarakat Untuk Menyampaikan Pendapat.

Pada indikator ini sangatlah penting bagi masyarakat untuk memiliki akses untuk menyampaikan pendapatnya kepada aparat desa, karena jika masyarakat tidak mempunyai akses untuk menyampaikan pendapat maka keputusan yang di keluarkan bukan suatu keputusan yang berdasarkan keinginan msayarakat desa itu sendiri dalam hal ini keputusan masyarakat Desa Kurungan Nyawa.

Upaya-upaya dalam memberikan akses bagi masyarakat di Desa Kurungan Nyawa untuk menyampaikan pendapat melalui kelembagaan yang berada di tingkat Desa Kurungan Nyawa contohnya adalah BPD, dan lembaga terendah yang ada di tingkat desa adalah RT dan LK. Karena lembaga-lembaga ini terbentuk dari perwakilan orang-orang dari tiap dusun. Masyarakat Desa Kurungan Nyawa dapat menyampaikan pendapat mereka melalui perwakilan-perwakilan mereka di tiap dusun yang kemudian perwakilan tiap dusun akan melanjutkan pendapat mereka di tingkat desa dalam acara rapat koordinasi yang secara rutin dilakukan tiap bulannya.

Terdapat juga sistem jemput bola untuk memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat adalah dengan keliling ke sudut-sudut Desa Kurungan Nyawa berkoordinasi dengan aparat RT dan Kepala Dusun masing-masing, atau sebaliknya peran RT di maksimalkan sehingga bila ada keluhan atau saran dari warga, RT dapat berkoordinasi dengan aparat Desa Kurungan Nyawa untuk menentukan langkah apa yang akan diambil melalui rapat-rapa Desa Kurungan Nyawa.

C. Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran

Informasi merupakan salah satu bagian yang sangat penting bagi kehidupan desa saat ini, terlebih sistem demokrasi yang mengenal adanya pengakuan terhadap kebebasan dalam memperoleh informasi bagi masyarakat. Tertutupnya kebebasan dalam memperoleh informasi dapat berdampak pada banyak hal seperti rendahnya

tingkat pengetahuan dan wawasan warga yang pada akhirnya juga berdampak pada rendahnya kualitas hidup desa itu sendiri. Sementara itu dari segi penyelenggaraan pemerintahan desa, tidak adanya informasi yang dapat diakses oleh publik dapat berakibat pada lahirnya kepemimpinan yang otoriter dan tidak demokratis, untuk memahami sejauhmana transparansi di Desa Kurungan Nyawa dapat dilihat dengan indikator sebagai berikut :

1. Penyediaan dan Kemudahan Akses Informasi

Pada indikator ini, aparat Desa Kurungan Nyawa sebagai pelayan masyarakat di haruskan menyediakan berbagai informasi yang jelas tentang apa saja yang akan di lakukan dan yang telah di lakukan, hal ini di lakukan agar masyarakat Desa Kurungan Nyawa mengetahui tentang kegiatan yang akan di lakukan dan tidak salah menafsirkan informasi yang di berikan oleh aparat Desa Kurungan Nyawa.

Upaya yang di lakukan oleh Pemerintah Desa Kurungan Nyawa dalam menyediakan informasi kepada warga masyarakat antara lain dengan melakukan sosialisasi suatu kegiatan atau kebijakan, dari sebelum kebijakan di keluarkan sampai dengan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Desa Kurungan Nyawa, sosialisasi ini dapat berupa papan pengumuman yang di pasang di Balai Desa Kurungan Nyawa, membagikan informasi-informasi kepada RT dan Kepala Dusun agar masyarakat dapat mengetahui, dan melalui rapat-rapat kelembagaan misalnya BPD, Karang Taruna dan lain sebagainya atau juga informasi secara lisan yang di tugaskan melalui RT untuk disampaikan kepada masyarakat. Berikut adalah gambaran transparansi di Desa Kurungan Nyawa yang terlihat ditabel di bawah ini

Tabel 10. Transparansi Desa Kurungan Nyawa

Indikator	Aksi	Out Put
Penyediaan Informasi yang Jelas	Papan Pengumuman di Balai Desa, agenda-agenda Desa Kurungan Nyawa dan hasil Kegiatan tercatat	Masyarakat dapat mengetahui informasi secara jelas
Mekanisme Pengaduan atau keluhan warga	Disediakan kotak saran dan atau dapat disampaikan melalui BPD lewat rapat –rapat Desa	Kemudahan dalam memberikan saran dan keluhan

Sumber : Observasi lapangan dan wawancara informan

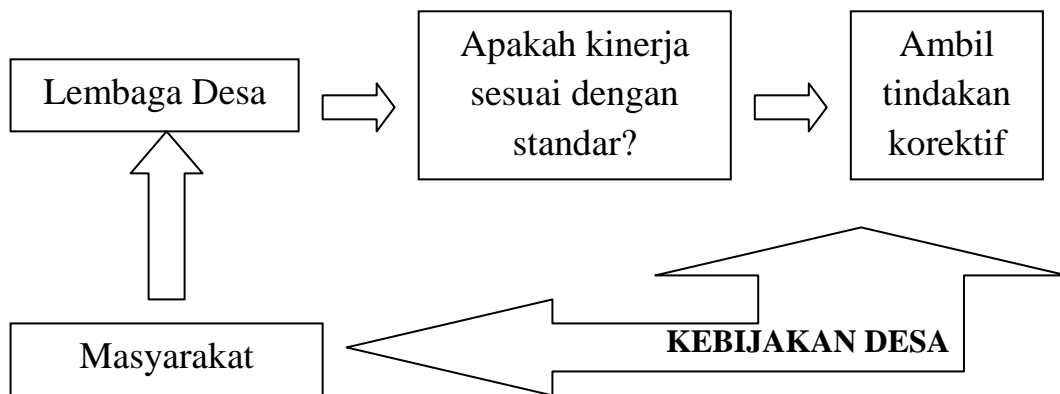
Berdasarkan tabel di atas aparat Desa Kurungan Nyawa berusaha secara maksimal memberikan ruang bagi warga untuk mendapatkan akses informasi, karena dengan ketersediaan informasi tersebut masyarakat desa dapat sekaligus mengawasi sehingga kebijakan Desa Kurungan Nyawa dapat berjalan optimal sehingga dapat meminimalisir kecurangan dan manipulasi yang hanya menguntungkan beberapa pihak saja secara tidak proporsional, kendala yang muncul adalah tidak semua warga mengetahui proses kebijakan Desa Kurungan Nyawa dari awal sehingga memunculkan dinamika persepsi yang berbeda di tingkat bawah.

2 Penyusunan Mekanisme Pengaduan

Pada indikator ini, mengharuskan agar setiap aparat khususnya aparat Desa Kurungan Nyawa agar dapat menyusun semacam mekanisme pengaduan terhadap pelanggaran peraturan atau keputusan yang telah di buat oleh aparat desa itu sendiri. Hal ini perlu di lakukan agar masyarakat mengetahui cara pengaduan

terhadap pelanggaran dan masyarakat dapat mengontrol jalannya pemerintahan desa agar sesuai dengan mekanisme yang seharusnya.

Kenyataannya mekanisme pengaduan di Desa Kurungan Nyawa masih terkendala akibat minimnya pengetahuan warga terhadap penyelenggaraan pendidikan, pada Bab IV dijelaskan jumlah Sarjana di Desa Kurungan Nyawa berjumlah 86 orang dari 1.132 orang, maka dapat di pahami mekanisme pengaduan di Desa Kurungan Nyawa terstruktur melalui lembaga-lembaga desa, seperti BPD ditingkat Desa dan RT di tingkat lingkungannya masing-masing. Peran lembaga-lembaga ini adalah sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengartikulasikan kepentingannya sekaligus menjadi sarana pengaduan masyarakat. Mekanisme pengaduan di Desa Kurungan Nyawa dapat kita lihat dari diagram gambar dibawah ini :



Sumber : Observasi lapangan dan wawancara informan

Gambar 5 . Diagram Mekanisme Pengaduan Desa Kurungan Nyawa

Berdasarkan gambar di atas menggambarkan bahwa mekanisme pengaduan di Desa Kurungan Nyawa di bangun melalui lembaga desa yang ada di Desa Kurungan Nyawa sehingga kepentingan desa secara langsung dapat dirasakan

oleh masyarakat. Faktor nilai budaya berpengaruh sangat kuat dan sebagai faktor dominan yang mempengaruhi individu dan lingkungan, di karenakan seorang yang memberikan input pengaduan membutuhkan dorongan psikologis untuk terlibat dalam pembangunan desa.

Pengaruh yang sangat kuat faktor nilai budaya terhadap proses *input* oleh masyarakat desa di artikan bukan semata di hitung sebagai sumber daya masyarakat yang mempunyai nilai tambah, melainkan di akui sebagai manusia dan bagian dari membina hak-hak asasi manusia. Semangat faktor nilai-nilai kultural akan mendorong masyarakat dan pemerintah Desa kurungan Nyawa untuk saling bekerja sama dan berasosiasi dalam pembangunan desa.

Penulis menilai bahwa nilai budaya seperti masih menjunjung tinggi *patron-client*, *paternalisme*, sikap loyalitas tunggal, besar pengaruhnya terhadap proses *input* karena akan sangat mengganggu proses pengembangan nilai-nilai budaya politik demokratisasi. Di dukung dengan kritik yang tidak berkembang dan besar kemungkinan akan membentuk monopoli kekuasaan, terutama dalam politik dan ekonomi dan membentuk ketimpangan ketidakadilan yang ada di lingkungannya.

3. Peningkatan Arus Informasi

Pada indikator ini, di haruskan agar aparat Desa Kurungan Nyawa mampu meningkatkan dan menambah informasi-informasi tentang keadaan desa pada umumnya. Hal ini di perlukan agar masyarakat tidak ketinggalan informasi yang terjadi di desa mereka. Peningkatan informasi tidak akan berjalan jika tidak ada kemauan yang kuat dari aparat desa itu sendiri untuk melakukannya.

Sehubungan dengan indikator peningkatan arus informasi di Desa Kurungan Nyawa tidak terlaksana hal ini terlihat dari jawaban Sekretaris Desa Sujal Hairum, bahwa informasi yang masuk di Desa Kurungan Nyawa adalah informasi yang di datangkan dari daerah lain-lain, yang terkadang informasi tersebut menafikan wajah pedesaan, informasi yang di terima selalu berwajah kota sehingga karakteristik informasi yang di terima sulit untuk ditangkap di desa, apalagi kemauan dan kemampuan masyarakat untuk menerima informasi dari luar cukup rendah, hal ini senada dengan pendapat Kepala Dusun Gedong Dalem Mahyudin :

“Televisi dan koran yang ditampilkan terkadang sulit dimengerti untuk orang desa seperti kami yang pendidikannya rendah, apalagi informasi yang diterima masih setengah-setengah karena kesibukan orang-orang desa bekerja dikebun dan sebagainya, Siapa yang mau baca koran, lha wong isinya angka-angka melulu yang bikin sakit kepala, bahasanya juga tidak bisa dinalar dengan orang-orang yang berpendidikan rendah.”

Berdasarkan dari komentar informan diatas penulis menilai peningkatan arus informasi yang terjadi di desa berjalan timpang, disatu sisi adanya kebebasan pers, namun di sisi lain ketidakaktifan masyarakat untuk membuka diri menerima informasi yang di sajikan, hal ini di karenakan nilai berita dengan corak kultur kekotaan sulit untuk di adaptasi oleh masyarakat desa khususnya masyarakat Desa Kurungan Nyawa.

Pendekatan yang seharusnya lebih dulu dilakukan adalah bagaimana membudayakan membaca bagi masyarakat Desa Kurungan Nyawa, baru kemudian menjadikan masyarakat itu pintar. Pendekatan tidak hanya cukup dengan hubungan yang integral dengan pihak-pihak yang mempunyai otoritas pedesaan, tetapi perlu bekerjasama dengan kelompok kepemudaan, kelompok tani, kelompok pedagang, kelompok pengajian dan macam-macam kelompok lain

yang adanya tidak secara formal. Memang kerja yang cukup berat, karena di hadapkan pada suatu kondisi yang benar-benar masih nol untuk menuju kepada masyarakat yang berfikir dalam baca-membaca.

D. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran

Akuntabilitas publik merupakan landasan bagi proses penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabilitas di perlukan karena aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya kepada masyarakat / publik dan organisasi yang menaunginya.

Akuntabilitas sebagai persyaratan mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang di delegasikan dan menjamin kewenangan di arahkan pada pencapaian tujuan nasional yang dapat di terima secara luas, dengan demikian akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atas tindakan pemerintah kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Selain itu akuntabilitas juga menghendaki birokrasi publik dapat menjelaskan dengan transparan dan terbuka kepada publik mengenai tindakan apa yang telah di lakukan termasuk mengenai metode, realitas pelaksanaan dan dampaknya. Dengan adanya penjelasan tersebut maka masyarakat akan mengerti apa yang telah di lakukan oleh pemerintah dan bagaimana dampaknya.

Penerapan prinsip akuntabilitas di Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Periode Tahun 2009 dapat di lihat dari beberapa indikator antara lain :

1. Proses Pembuatan Sebuah Keputusan Yang Di buat Secara Tertulis dan Tersedia Bagi Warga.

Wujud *good governance* dalam pelaksanaan pemerintahan sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab serta efektif dan efisien, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain-domain pemerintah, sektor swasta dan masyarakat, Prosedur dan metode pembuatan keputusan harus transparan agar memungkinkan terjadinya partisipasi efektif dan *chek and balances* dari seluruh elemen.

Organisasi atau badan-badan pemerintah manapun yang di berikan mandat untuk membuat dan melaksanakan keputusan tersebut tentunya harus dapat mempertanggung jawabkannya secara transparan kepada publik, selain itu publik dan domain-domain pemerintah di tuntutan untuk melaksanakan fungsi pengawasan (*chek and balances*).

Berdasarkan indikator ini, pada dasarnya suatu keputusan yang di buat oleh aparat pemerintahan haruslah di buat secara tertulis, selain itu juga suatu keputusan harus tersedia bagi masyarakat, hal ini di lakukan agar tidak ada kecurigaan masyarakat kepada aparat pemerintahan atas apa yang telah di putuskan oleh aparat desa khususnya aparat Desa Kurungan Nyawa.

Dalam konteks Desa Kurungan Nyawa perumusan kegiatan di lakukan bersama BPD, Kepala-kepala dusun, RT melalui rapat-rapat desa, keputusan dari lembaga Desa Kurungan Nyawa yang di sosialisasikan ke masyarakat ada yang tercatat adapula yang tidak tercatat. Yang tercatat adalah menyangkut administrasi, misalnya masalah pertanahan, kependudukan, Perdes dan lain sebagainya, adapun hal-hal yang tidak di catat adalah hal-hal yang menyangkut kegiatan yang tidak berkenaan dengan administrasi Desa Kurungan Nyawa misalnya perayaan yang bersifat seremonial kegiatan HUT RI, Pengajian dan lain sebagainya.

Menurut Tokoh masyarakat Desa Kurungan Nyawa Bapak Sutoto di akui bahwa manajemen administrasi di Desa kurungan Nyawa cukup lemah karena keterbatasan Sumber Daya Manusia. Hal ini di tunjukkan masih terbatasnya ketersediaan aparatur pemerintah Desa Kurungan Nyawa, dari segi profesionalisme, dan terbatasnya kesejahteraan aparat pemerintah Desa Kurungan Nyawa. Hal demikian menyebabkan tingkat pelayanan publik tidak dapat berjalan optimal yang di tandai dengan lambatnya kinerja pelayanan, tidak adanya kepastian waktu. Masih rendahnya kondisi pendidikan, merupakan faktor yang paling utama penyebab masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah Desa Kurungan Nyawa.

2. Akurasi dan Kelengkapan Informasi

Akurasi dan kelengkapan atas suatu informasi adalah ketika pemerintah dalam hal ini adalah aparat Desa Kurungan Nyawa memberikan informasi tentang sesuatu sesuai dengan apa adanya tanpa ada yang di kurangi sedikit apapun informasi tersebut. Akurasi dan kelengkapan pemberitahuan atas suatu informasi merupakan

hal yang harus di lakukan oleh aparat pemerintah Desa Kurungan Nyawa, hal ini di lakukan agar dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat Desa Kurungan Nyawa.

Dalam konteks Pemerintahan Desa Kurungan Nyawa untuk masalah akurasi dan kelengkapan informasi contohnya dalam hal pengelolaan keuangan Desa belum dapat di katakan lengkap di informasikan kepada Masyarakat, hal ini dikarenakan dari awal penganggaran keuangan Desa Kurungan Nyawa, tata usaha keuangan Desa Kurungan Nyawa, dan pertanggung jawaban keuangan Desa Kurungan Nyawa tidak melibatkan masyarakat Desa Kurungan Nyawa, hanya melibatkan intern aparat Desa Kurungan Nyawa saja. Sehingga masyarakat tidak mengetahui secara lengkap apa saja yang akan di lakukan oleh aparat desa dalam jangka waktu tertentu, apa saja yang menjadi pemasukan dan pengeluaran serta besarnya dana yang di gunakan untuk membiayai keperluan Desa Kurungan Nyawa, dan apa saja yang telah dihasilkan.

Hal tersebut, dipertegas oleh pernyataan tokoh masyarakat Bapak Sutoto di mana beliau mengatakan bahwa :

“Saya sebagai masyarakat Desa Kurungan Nyawa tidak begitu mengetahui mengenai informasi Keuangan Desa Kurungan Nyawa, saya hanya mengetahui kegiatan yang di lakukan oleh aparat desa, ketika kegiatan itu sudah di jalankan. Tapi untuk informasi keuangan desa secara lengkap mungkin hanya untuk kalangan intern atau antar aparat Desa Kurungan Nyawa saja”

Berdasarkan hasil dari wawancara dapat di katakan bahwa pada indikator ini Aparat Desa Kurungan Nyawa belum sepenuhnya melaksanakan indikator ini. Aparat Desa Kurungan Nyawa hanya menyampaikan informasi contohnya dalam

hal keuangan Desa Kurungan Nyawa secara garis besar saja karena aparat Desa Kurungan Nyawa masih beranggapan bahwa keuangan desa masih merupakan suatu hal yang sangat sensitif untuk di jabarkan kepada publik secara rinci.

3. Kejelasan dari sasaran kebijakan yang di ambil dan di komunikasikan

Pada indikator ini, di harapkan agar aparat pemerintah khususnya aparat Desa Kurungan Nyawa mengkomunikasikan secara jelas semua kebijakan yang telah di tetapkan oleh aparat Desa Kurungan Nyawa. Hal ini di perlukan agar masyarakat Desa Kurungan Nyawa mengerti tentang hal-hal yang telah di tetapkan dengan jelas tujuan atau sasarannya.

Dalam konteks pemerintahan Desa Kurungan Nyawa ada 2 (dua) tahapan kebijakan yaitu perencanaan dan pelaksanaan, hal ini dapat di lihat dalam bentuk tabel matrik di bawah ini :

Tabel 11. Tahapan Kebijakan di desa Kurungan Nyawa

PERENCANAAN	PROSES	HASIL
Menentukan Obyek Pendapatan Asli Desa	Di lakukan dengan cara Musyawarah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa.	1. Hasil Usaha Desa 2. Hasil Kekayaan Desa 3. Hasil swadaya masyarakat 4. Pendapatan lain yang sah yang dimiliki oleh Desa
Pembagian Tugas Kerja Yang Jelas yang tergabung dalam Satuan Kerja	Di lakukan dengan cara Musyawarah Desa bersama Pemerintah Desa dan perangkatnya	Di sesuaikan dengan fungsi dan tugas kerjanya masing-masing
Pembangunan sarana fisik Desa dari bantuan pemerintah Kabupaten dan swadaya masyarakat	Di lakukan dengan cara Musyawarah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa.	Penentuan skala prioritas pembangunan fisik.
1	2	3
TAHAPAN PELAKSANAAN		
Pemungutan dilakukan oleh Kepala Desa	Pemungutan di pungut oleh Kepala Dusun kecuali pungutan yang bukan di pungut oleh Kepala Dusun yang telah di sesuaikan dengan penentuan Pendapatan Desa yang telah di sepakati	1. Swadaya dan partisipasi masyarakat untuk pembangunan Desa 2. Upah pungutan PBB 3. Pendapatan dan pengganti gotong royong 4. Pendapatan lain-lain yang sah seperti : penggilingan padi, galian batu dan pasir
Pelaksanaan Pembangunan fisik di lakukan dengan gotong royong warga	Di kenakan giliran dan jadwal gotong royong warga	1. Perbaikan Balai Desa 2. Perbaikan gorong-gorong 3. Pembuatan Paving Blok

Sumber : hasil observasi dan wawancara di lapangan

Berdasarkan tabel diatas dapat di pahami bahwa kebijakan Desa Kurungan Nyawa terpolo dengan memberdayakan masyarakat Desa Kurungan Nyawa tidak hanya dalam bentuk komunikasi verbal namun pendekatan yang di lakukan adalah mengajak masyarakat secara aktif untuk ikut dalam membantu pelaksanaan kebijakan desa, namun penulis melihat bahwa kebijakan yang di kembangkan di masyarakat di luncurkan pemerintah desa bersifat konsumtif, belum bisa

mengurangi atau menekan pengangguran dan kemiskinan yang ada di Desa Kurungan Nyawa, karena fokus kebijakan lebih pada sarana fisik, meskipun tidak dapat di pungkiri pembangunan non-fisik mempunyai andil dalam memajukan Desa Kurungan Nyawa secara efektif, karena hal ini pun akan menyentuh kapasitas SDM di Pemerintah Desa Kurungan Nyawa maupun di masyarakatnya.

Biasanya kebijakan di Desa Kurungan Nyawa lebih merupakan konvensi yang secara personal di bangun, atau jika tidak kebijakan desa lebih berupa cetusan-cetusan pemikiran aparat khususnya Kades yang secara spontan di terapkan sebagai arah gerak desa. Karena itu mungkin nuansa kebijakan di desa Kurungan Nyawa cenderung *top down* ketimbang *bottom up*. Memang di desa ini lazim di temui forum rembug desa, namun forum rembug desa itu lebih banyak menjadi sarana sosialisasi kebijakan ketimbang menjadi semacam forum tukar pendapat untuk menyerap aspirasi masyarakat. Program-program yang di cetuskan dan di laksanakan oleh Kades biasanya berfokus pada satu hal yaitu pembangunan fisik desa. Pembangunan fisik juga merupakan program andalan pimpinan desa. Hal-hal yang lazim menjadi perhatian utama adalah pengerasan jalan, pembangunan atau rehabilitasi tempat-tempat ibadah, pembuatan saluran air, dan sudah barang tentu renovasi kantor pemerintah desa.

Pola yang dilakukan dalam pembangunan fisik ini rata-rata seragam. Andalan aparatur desa pada dasarnya adalah pungutan dana masyarakat. Mobilisasi dana masyarakat semacam ini merupakan program yang dominan yang ada desa ini. Biasanya setiap kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan pemerintah desa

menjadi pos di lakukannya pungutan dana dari masyarakat, dengan besaran yang sangat bervariasi menurut jenis pelayanannya

4. Akses publik pada informasi atas suatu keputusan

Pada indikator ini di harapkan seluruh masyarakat khususnya masyarakat Desa Kurungan Nyawa, mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan informasi atas suatu keputusan yang telah di putuskan oleh aparat pemerintah khususnya aparat Desa Kurungan Nyawa, mendapatkan suatu kemudahan dalam mengakses informasi atas suatu keputusan yang telah di putuskan akan membuat masyarakat merasa terlayani oleh aparat desa.

Desa Kurungan Nyawa untuk kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi atas suatu keputusan yang telah di putuskan yang di perlukan oleh masyarakat di letakkan di papan pengumuman di kantor Desa Kurungan Nyawa contohnya dalam bentuk perdes dan juga suatu keputusan yang telah di hasilkan akan di perbanyak dan di berikan kepada masing-masing ketua RT dan Kepala-Kepala Dusun di tiap masing-masing dusun, hal ini di mungkinkan agar masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi.

5. Monitoring Hasil

Monitoring hasil adalah istilah yang di gunakan dalam lingkup aparat desa, dan di artikan sebagai kemauan untuk mengevaluasi kebijakannya untuk kemudian di koreksi dan kembali di sempurnakan dalam kebijakan terhadap masyarkat dalam memberikan jasa pelayanan dengan cepat.

Ada beberapa hal dalam kajian monitoring hasil di Desa Kurungan Nyawa, Pertama program pengelolaan sumber daya aparatur, program ini bertujuan untuk meningkatkan sistem pengelolaan dan kapasitas sumber daya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Menata kembali sumberdaya manusia berkaitan dengan aparatur Desa
- b. Menyempurnakan sistem manajemen pengelolaan sumberdaya manusia aparatur terutama pada profesionalisme dalam menghadapi era pembangunan;
- c. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas ;
- d. Menyempurnakan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat;
- e. Menyiapkan dan menyempurnakan berbagai peraturan dan kebijakan manajemen kepegawaian;
- f. Mengembangkan profesionalisme pegawai negeri melalui penyempurnaan aturan etika dan mekanisme penegakan hukum disiplin.
- g. Meningkatkan sumberdaya manusia dalam pengelolaan barang daerah.

Kedua, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program ini bertujuan untuk mengembangkan manajemen pelayanan publik yang bermutu, transparan, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut dan adil kepada seluruh masyarakat guna menunjung kepentingan masyarakat dan dunia usaha, serta mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.
- b. Mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dalam setiap proses pemberian pelayanan publik khususnya dalam rangka mendukung penerimaan keuangan Desa;
- c. Meningkatkan upaya untuk menghilangkan hambatan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik melalui debirokratisasi;
- d. Memantapkan koordinasi pembinaan pelayanan publik dan pengembangan kualitas aparat pelayanan publik;
- e. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik;
- f. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat;
- g. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik melalui mekanisme dialog dan musyawarah;
- h. Mengembangkan mekanisme pelaporan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah Desa kepada masyarakat.

Dua kajian monitoring di atas memang mengalami banyak hambatan, Kepala Desa Abdurohim T berharap adanya peran Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Pusat untuk memberikan pelatihan untuk mencapai dua hal tadi, di akuinya bahwa monitoring hasil di Desa ini belum tertata dengan baik.

E. Penciptaan Pemerintahan Desa yang Baik

Upaya untuk mewujudkan proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, antara lain dapat tercermin dari indikator : Partisipasi, Transparansi dan akuntabilitas yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu di perlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan, kualitas sumber daya manusia aparatur, dan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif. Pemerintah Desa Kurungan Nyawa belum optimal melaksanakan konsep *Good Governance* secara penuh karena banyak hal belum di laksanakan oleh tiap-tiap perangkat secara maksimal dan optimal sehingga dalam implementasinya pun belum mencapai hasil yang baik. Hal ini dapat kita lihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 12. Proses Pemerintahan Desa Kurungan Nyawa

PERENCANAAN	PROSES	HASIL
Mendorong Partisipasi masyarakat	Membentuk forum/lembaga yang mewadahi partisipasi masyarakat	Terbentuknya lembaga-lembaga di tingkat Desa : PKK, Kader Pembangunan Desa, Lembaga Kegotongroyongan Adat, Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu, Kelompok Remaja Islam Masjid dll.
Mewujudkan akuntabilitas pemerintahan Desa	Perumusan kegiatan bersama BPD dan masyarakat melalui rapat-rapat desa.	Terciptanya hubungan sinergis antara pemerintah desa dengan masyarakat.
Mewujudkan Pemerintahan Desa yang transparan	Sosialisasi oleh pemerintah Desa yang merupakan transparansi terhadap kebijakan pemerintah desa, lewat papan informasi dibalai desa, surat atau musyawarah Desa dengan warga.	Keluhan warga lebih mudah didengar dan diapresiasi, lalu disikapi oleh pemerintah desa dan hubungan antara pemerintah desa lebih menguatkan kekerabatan pemerintah desa dengan warga
1	2	3
TAHAPAN PELAKSANAAN		
Digerakkan oleh Kepala Desa dan perangkat-perangkat Desa.	Koordinasi dengan pengurus organisasi dan ketua RT.	Partisipasi masyarakat mulai tumbuh meski lewat mobilisasi terlebih dahulu.
Kepala Desa Merekrut SDM yang mengerti administrasi Desa.	Meminta bantuan Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pelatihan tentang administrasi Desa	Administrasi Desa disusun secara baik sehingga bisa dipertanggung jawabkan /akuntabel.
Perangkat Desa melakukan sosialisasi hasil	Berkoordinasi dengan BPD dan RT.	Masyarakat luas lebih mengetahui tentang kegiatan-kegiatan Desa.

Sumber : Observasi lapangan dan hasil wawancara

Berdasarkan tabel di atas memberikan gambaran jebakan ketergantungan terhadap pemerintahan supra-desa yang di alami oleh pemerintahan Desa Kurungan Nyawa menjadi faktor penjelas mengapa inisiatif lokal sulit di tumbuhkan, pada kondisi kelembagaan yang sebenarnya cukup mantap. Meski terdapat variasi kemandirian

kelembagaan dan sisi manusianya. Apa yang di kembangkan dalam kebijakan pemerintah Desa Kurungan Nyawa yang kendati memuat konsep hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, namun bersamaan dengan hal tersebut, di nyatakan bahwa desa merupakan organisasi pemerintahan terendah di bawah camat. Dengan sendirinya Desa Kurungan Nyawa merupakan representasi (kepanjangan) pemerintah pusat. Hal ini berarti apa yang di anggap baik oleh pemerintah pusat (organisasi kekuasaan di atasnya) di pandang baik pula untuk desa. Asumsi ini bukan saja manipulatif, namun memiliki tendensi yang sangat kuat untuk mengalahkan keperluan, kebutuhan dan kepentingan desa, di tambah ketidakberdayaan partisipasi masyarakat Desa Kurungan Nyawa akibat krisis kreatifitas sehingga jalannya program amat terkesan di kendalikan oleh kebijakan organisasi di atasnya.

Tabel di atas secara jelas menunjukkan telah adanya upaya aparatur Desa Kurungan Nyawa untuk membuka diri namun di masyarakat desa, yang menjadi obyek risiko kebijakan, biasanya kurang mengetahui informasi kebijakan dari proses awal. Pemerintah desa sudah mengaku berbuat secara transparan ketika melakukan sosialisasi kebijakan (yang hampir final) kepada warga masyarakat. Tetapi sosialisasi adalah sekaligus proses transparansi.

Perangkat desa selalu di konstruksi sebagai “pamong desa” yang di harapkan sebagai pelindung dan pengayom warga masyarakat. Para pamong desa beserta elite desa lainnya di tuakan, di tokohkan dan di percaya oleh warga masyarakat untuk mengelola kehidupan publik maupun privat warga desa. Dalam praktiknya antara warga dan pamong desa mempunyai hubungan kedekatan secara personal

yang mungkin di ikat dengan tali kekerabatan maupun ketetanggaan, sehingga kedua unsur itu saling menyentuh secara personal dalam wilayah yang lebih privat ketimbang publik. Batas-batas urusan privat dan publik di desa sering kabur. Sebagai contoh, warga masyarakat menilai kinerja pamong desa tidak menggunakan kriteria modern (transparansi dan akuntabilitas), melainkan memakai kriteria tradisional dalam kerangka hubungan klientelistik, terutama kedekatan pamong dengan warga yang bisa di lihat dari kebiasaan dan kerelaan pamong untuk beranjangsana (jagong, layat dan sanja). Berkaitan dengan akuntabilitas desa, penetapan standar pencapaian tujuan dalam pelaksanaan kegiatan dan kebijakan pemerintah Desa Kurungan Nyawa belum membuat standar pencapaian tujuan secara jelas.

Kehidupan masyarakat Desa yang bercirikan *Good Governance* salah satunya ditandai dengan ruang publik. Makin kecil ruang publik makin tradisional suatu masyarakat dan juga sebaliknya. Dengan demikian, kehidupan privat yang amat jauh dan putus hubungannya dengan kehidupan publik justru menunjukkan tradisionalisme yang sempurna. Ini terjadi karena desa yang terbiasa dengan tata usaha dan di didik tunduk kepada tata krama dan tata negara, tetapi tak pernah di biasakan dengan tata tertib. *Good governance* berfungsi memperkecil jarak antara kehidupan privat dan kehidupan publik dengan menciptakan tata tertib. Pada titik itu, tata negara yang hanya di dasarkan pada tata krama akan seiring sejalan dengan tata tertib.

Pemerintah desa harus mampu menciptakan lingkungan ekonomi, sosial budaya, dan keamanan yang kondusif. Sektor swasta berperan aktif dalam menumbuhkan

kegiatan perekonomian yang akan memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, sedangkan masyarakat harus mampu berinteraksi secara aktif dengan berbagai macam aktifitas perekonomian, sosial dan politik termasuk bagaimana melakukan kontrol terhadap jalannya aktifitas-aktifitas tersebut.